



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROKHYAT RIYADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 141146

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.738.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 416 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
3. Tanah Seluas 392 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
4. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 397 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 395.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
3. MOBIL, JAZZ RS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.809.376.955

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.998.376.955

III. HUTANG Rp. 72.518.250



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.925.858.705

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.